

PENGARUH INFLASI TERHADAP TINGKAT PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

Faridatul M

Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya

ABSTRACT

Jawa Timur has experienced inflation as a economic problem. On the other hand the unemployment rate at Jawa Timur is not too high because the majority of the population work in informal sector. The purpose of this study was determining how the effect of inflation on the level of informal sector workers and knowing forecasting inflation and the level of informal sector workers over the next 10 years. This study is associative research with quantitative approach because using figures in analyzing the data. The sample in this study was inflation data and level of informal sector workers from 1998 to 2013. Techniques of collecting data was using the documentation techniques. The analyze data used VAR analysis techniques. From the VAR analysis, it can be seen that inflation has a negative effect on the level of informal sector workers. In the forecasting models analysis, it can be seen that the rate of inflation from 2014 to 2023 are ranging in the 7,3% , while the rate of informal workers from 2014 to 2023 are ranging in the 68,5%.

Keywords: *Inflation , Informal Sector*

ABSTRAK

Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebagai masalah ekonomi. Di sisi lain tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tidak terlalu tinggi karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pekerja sektor informal. Selain itu juga untuk mengetahui peramalan inflasi dan tingkat pekerja sektor informal selama 10 tahun kedepan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka dalam menganalisis data. Sampel dalam penelitian ini adalah data inflasi dan tingkat pekerja sektor informal dari tahun 1998 sampai dengan 2013. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Untuk menganalisis data digunakan teknik analisis VAR. Dari hasil analisis menggunakan VAR dapat diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pekerja sektor informal. Dalam analisis dengan menggunakan model forecasting, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi dari tahun 2014 sampai tahun 2023 berkisar pada angka 7,3%, sedangkan tingkat pekerja informal pada tahun 2014 hingga tahun 2023 berkisar pada angka 68,5%.

Kata kunci : *Inflasi, Sektor Informal*

Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang

dihadapi suatu negara sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan yang tepat guna menjaga dan mengawasi laju inflasi.

Di Provinsi Jawa Timur inflasi juga menjadi problem dalam perekonomian. Tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 inflasi di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 9,66%. Menurut sudut pandang teori tekanan biaya atau (*Cost Push Teory*), inflasi yang tinggi pada tahun 2008 merupakan dampak dari adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya sehingga berpengaruh juga terhadap upah dan harga.

Fenomena di mana pada suatu periode pertumbuhan berjalan dengan pesat sehingga mengurangi masalah pengangguran tetapi harus menghadapi masalah inflasi, dan pada periode lain kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang lambat dan memperburuk masalah pengangguran, merupakan keadaan yang selalu berlaku di setiap negara (Sukirno: 2000).

Pengangguran inilah yang melandasi munculnya masalah sektor informal. Semenjak Indonesia dilanda krisis, permintaan tenaga kerja di sektor informal ini semakin besar dikarenakan keterbatasan sektor formal dalam menerima

pasokan tenaga kerja bahkan juga berpeluang besar dalam mengurangi tenaga kerjanya, sehingga sektor informallah yang menjadi harapan dari para penganggur tersebut (Mulyadi: 2003).

Fenomena kegiatan ekonomi informal di Indonesia lebih terlihat di beberapa kota besar terutama di Pulau Jawa. Dapat kita lihat kondisi di Propinsi Jawa Timur dengan lapangan kerja yang terbatas serta proses industrialisasi yang terpusat di beberapa kota besar yang padat modal membawa konsekuensi bahwa hanya tenaga kerja yang benar-benar berkualitas saja yang dapat memasuki sektor formal, sementara sektor informal pada saat yang bersamaan mengalami peningkatan dalam kapasitas dan intensitas kegiatannya.

Berdasarkan data yang diakses oleh Berita Resmi Statistik, di Provinsi Jawa Timur jumlah pengangguran tidak terlalu banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan cenderung terus berkurang setiap tahunnya. Namun sebagian besar penduduk yang bekerja tersebut masuk ke dalam sektor informal.

Banyak orang yang beranggapan bahwa berkurangnya jumlah penganggur karena banyak pekerja yang terserap di sektor informal ini belum tentu menunjukkan pembangunan ekonomi yang baik. Hal ini karena sektor informal yang kurang menjamin dibandingkan dengan sektor formal. Selain itu Mulyadi (2003) bahkan menjelaskan bahwa sebagian besar, para pekerja di sektor informal di Indonesia adalah para pekerja yang tidak mendapat perlindungan ekonomi, tidak mempunyai perjanjian jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pekerja Sektor Informal di Provinsi Jawa Timur”.

Inflasi

Menurut Boediono (1990) definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Boediono menegaskan bahwa kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut membawa dampak pada

kenaikan sebagian besar dari harga-harga barang lain.

Sedangkan Sukirno (2000) mengatakan inflasi adalah keadaan di mana uang yang beredar berlebihan sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga yang menyeluruh. Dari beberapa pengertian inflasi yang telah dijelaskan di atas, pada intinya inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum yang terjadi secara terus menerus.

Macam-Macam Inflasi

Waluyo (2007) menjelaskan macam-macam inflasi ditinjau dari sumber atau sebab musabab awal inflasi dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah *demand pull inflation* yakni inflasi yang timbul karena permintaan dalam negeri akan berbagai barang sangat kuat dan besar serta melebihi *output* yang ada dalam perekonomian tersebut. Kedua adalah *cost push inflation*. Pada inflasi ini kenaikan harga terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*), atau dapat pula terjadi karena buruh menuntut kenaikan upah (*Wage push inflation*). Inflasi jenis ketiga adalah inflasi kombinasi (*combination*

inflation) yakni inflasi yang timbul karena pengaruh pergeseran permintaan dan penawaran masyarakat.

Teori Inflasi

Teori yang pertama adalah teori kuantitas yang dikembangkan oleh kelompok monetaris. Kelompok tersebut berpendapat bahwa inflasi hanya dapat terjadi bila ada kenaikan jumlah uang beredar. Harga-harga akan naik karena adanya kelebihan uang yang diciptakan atau diproduksi oleh bank sentral.

Teori yang kedua adalah teori Keynes dan teori desakan biaya (*Cost Push Theory*) yang mengatakan bahwa proses inflasi merupakan proses tarik menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian masyarakat yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Jika hal ini terus terjadi, maka akan timbul suatu kesenjangan inflasi (*Inflationary Gap*). Tekanan dari golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya (*Cost Push*). Menurut *Cost Push Theoritics* ini, untuk mengetahui proses inflasi perkiraannya diamati dari faktor

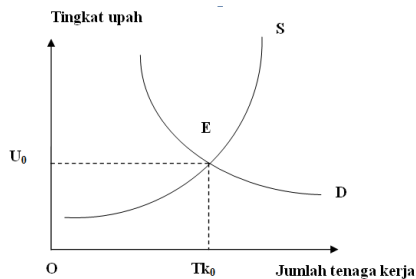
kelembagaan yang dapat mempengaruhi upah dan harga. Adanya suatu kesenjangan di atas akan menaikkan harga-harga dan laju inflasi.

Teori yang ketiga adalah teori strukturalis yang menjelaskan bahwa dengan tingginya ongkos tentu akan mengakibatkan harga barang-barang substitusi impor menjadi lebih mahal. Maka dengan sendirinya proses ini akan saling kait mengkait dengan sektor lain yang menggunakan barang-barang substitusi impor tersebut, sehingga harga terpengaruh untuk naik.

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu, jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masing sebesar Tk_0 pada tingkat upah keseimbangan U_0 . Titik keseimbangan (*equilibrium*) adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbangan U_0 maka semua orang yang ingin bekerja telah mendapatkan pekerjaan, yang berarti

tidak ada lagi pengangguran. Keadaan seperti ini disebut keadaan full employment pada tingkat upah U_0 .



Gambar: Kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu

Teori Upah Besi

Mankiw (2009) memberikan penjelasan mengenai teori upah subsistensi (hukum besi) oleh David Ricardo yaitu upah ditentukan oleh interaksi penyediaan dan permintaan akan buruh. Asumsi selanjutnya mengatakan bahwa bila pendapatan penduduk bertambah di atas tingkat subsisten, maka penduduk akan bertambah lebih cepat dari laju pertumbuhan makanan dan kebutuhan lain, sehingga angkatan kerja bertambah. Dengan bertambahnya angkatan kerja tersebut maka bertambah pula angkatan kerja yang memasuki pasar kerja dan mencari kerja sehingga penawaran kerja menjadi lebih besar dari permintaan.

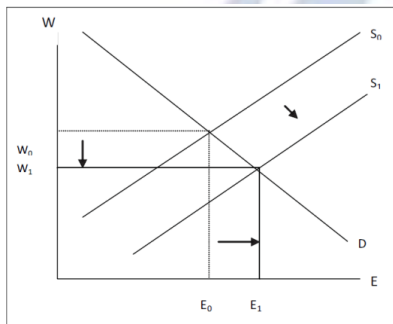
Teori upah besi ini cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan penganggur. Kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga para penganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha akan disulitkan dengan kenaikan biaya produksi.

Hubungan Upah Minimum dengan Tenaga Kerja

Hubungan upah minimum dengan tenaga kerja dapat dilihat pada perluasan dari model kompetitif yang dikembangkan oleh Welch menjadi model dual sektor. Model ini memiliki asumsi bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal yakni sektor yang terkover oleh kebijakan upah minimum dan sektor informal yang merupakan sektor yang tidak terkover oleh kebijakan upah minimum.

Jika kemudian ada kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan tingkat keseimbangan upah W_0 , hal ini akan menyebabkan sektor formal menjadi lebih dipilih oleh pekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kata lain kebijakan upah minimum ini menyebabkan

kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) pada sektor formal. Berdasarkan pada model dual sektor ini kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Kondisi ini digambarkan oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal dari S_0 ke S_1 .



Gambar: Upah minimum di sektor informal

Tinjauan Teoritis Sektor Informal dan Formal

Saparini dan Basri dalam Lestiyasari menggunakan status pekerjaan utama untuk pengelompokan sektor formal sebagai berikut: a) mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan, b) berusaha dengan dibantu buruh tetap. Sedangkan yang termasuk dalam sektor informal diantara lain: a) mereka yang berusaha sendiri, b) berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, c) pekerja bebas di pertanian, d) pekerja bebas di non pertanian e) buruh tidak dibayar.

Mulyadi (2003) menerangkan faktor internal adalah tingkat produktivitas yang tidak seimbang yang ditunjukkan oleh *marginal productivity of labour* (MPL) yang sangat tinggi. Semua terjadi akibat ketimpangan dalam penguasaan akses modal, kredit, sumber daya pekerjaan, teknologi dan proses pengolahan informasi.

Sedangkan yang termasuk faktor eksternal yang pertama adalah pranata-pranata yang mendukung kegiatan ekonomi formal yang modern. Yang kedua adalah karena kesenjangan tingkat upah. Ketiga, terkait dengan masalah teknis-politis di mana kalangan birokrasi di Indonesia kurang mencermati dan memahami perkembangan modernisasi yang begitu cepat.

Konsep Sektor Informal

Hidayat dalam Mulyadi (2003) menjelaskan mengenai laporan ILO dan dari berbagai penelitian tentang sektor informal di Indonesia telah menghasilkan sepuluh ciri pokok sebagai berikut: 1) kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan

fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor formal, 2) pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha, 3) pola kegiatan usaha tidak teratur baik lokasi maupun jam kerjanya, 4) pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai pada sektor informal, 5) unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke subsektor lain, 6) teknologi yang dipergunakan bersifat primitif, 7) modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil, 8) pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-men-enter prises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga, 9) sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi, 10) hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah.

Sektor Informal dan Penyerapan Tenaga Kerja

Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan menjelaskan beberapa keterkaitan antara sektor informal dengan penyerapan tenaga kerja.

Yang pertama adalah mengenai persyaratan masuk, angkatan kerja mudah terserap pada sektor informal karena sektor informal memberikan kebebasan kepada angkatan kerja untuk masuk maupun keluar dari pekerjaan tanpa persyaratan-persyaratan yang cukup rumit seperti yang ada pada sektor formal. Yang kedua dari segi waktu kerja sektor informal yang lebih memberikan kebebasan, dengan adanya kebebasan waktu kerja, angkatan kerja menjadi lebih fleksibel dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga adalah dari faktor usia, secara relatif bekerja pada sektor informal tidak memiliki batas usia seperti yang diberlakukan pada sektor formal, artinya bekerja di sektor informal tidak ada istilah usia produktif atau non produktif, berdasarkan gambaran ini bagi angkatan kerja yang sudah tidak lagi diperkerjakan di sektor formal dan masih mempunyai minat dan keinginan untuk bekerja dapat terserap pada sektor informal. Dan yang terakhir adalah keterkaitan penyerapan tenaga kerja dengan sektor informal ditinjau dari jenjang pendidikan, bagi angkatan kerja yang menempuh pendidikan formal yang terbatas (rendah) yang sulit

memasuki sektor formal dapat diterima pada sektor informal.

Dengan tertampungnya angkatan kerja pada sektor informal, maka dapat dikatakan bahwa tenaga kerja tersebut telah terserap dalam sektor informal. Sektor informal mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal mengingat keterbatasan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja, sektor informal juga mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Daru Wahyuni, pada Jurnal *Economia* dengan judul *"Peran Sektor Informal dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Indonesia"* yang menganalisis secara deskriptif peran sektor informal terhadap pengangguran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sektor informal di Indonesia telah menjadi tumpuan harapan bagi para pekerja dan terbukti mampu menjadi *safety belt* bagi ancaman ekonomi makro berupa tingkat pengangguran yang tinggi.

Penelitian oleh Ida Ayu Nyoman Saskara dan David Kaluge dengan judul *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Perempuan"* menyatakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja dapat menurunkan pengangguran perempuan. Sedangkan walaupun laki-laki bekerja meningkat pengangguran perempuan bisa juga meningkat. Sementara inflasi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Lestyasari dalam jurnalnya yang berjudul *"Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal di Jawa Timur"* memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan jumlah tenaga kerja formal, ketika Upah Minimum Provinsi naik, maka jumlah tenaga kerja formal di Jawa Timur juga akan naik. Tenaga kerja di sektor formal pada umumnya mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang tinggi dengan produktivitas yang tinggi pula.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aleksander Berentsen, Guido Menzio dan Randall Wright yang berjudul *Inflation And Unemployment In The Long Run*, menyatakan bahwa faktor moneter salah satunya inflasi, penting untuk hasil paar tenaga kerja, tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara kuantitatif.

Metode Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan jika ditinjau dari tingkat penjelasannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Dengan analisis VAR, dapat diketahui seberapa besar inflasi sebagai variabel X mempengaruhi tingkat pekerja sektor informal variabel Y.



Keterangan:

Variabel X : inflasi di Jawa Timur

Variabel Y : tingkat pekerja sektor informal di Jawa Timur

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1998 - 2013 dan tingkat pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1998 - 2013.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Analisis deskriptif yang dipakai menjelaskan mengenai tingkat inflasi dan tingkat pekerja sektor informal di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 - 2013. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis *vector autoregressive* (VAR). Model VAR yang digunakan adalah:

$$X_t = \alpha_{2i} + \sum \beta_{2t} Y_{t-i} + \sum \gamma_{2i} X_{t-i} + \varepsilon_t$$
$$Y_t = \alpha_{1i} + \sum \beta_{1t} Y_{t-i} + \sum \gamma_{1i} X_{t-i} + \varepsilon_t$$

Dari hasil estimasi VAR kita membandingkan nilai t-statistik hasil estimasi dengan nilai t-tabelnya untuk mengetahui apakah variabel X (inflasi) mempengaruhi variabel Y (tingkat pekerja sektor informal), demikian pula sebaliknya. Jika nilai t-statistik lebih besar daripada nilai t-tabelnya, maka dapat disimpulkan variabel inflasi mempengaruhi

variabel tingkat pekerja sektor informal, namun jika nilai t-statistik lebih kecil atau sama dengan nilai t-tabelnya maka dapat dikatakan bahwa inflasi tidak mempengaruhi tingkat pekerja sektor informal.

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Timur, tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2003 Jawa Timur mengalami inflasi yang tidak terlalu tinggi, yakni sebesar 4,23%. Namun angka tersebut meningkat hingga mencapai 5,92% di tahun 2004.

Tahun 2005 inflasi di Jawa Timur meningkat drastis, menjadi sebesar 15,19%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Inflasi yang tinggi pada tahun ini terjadi karena adanya kebijakan berat yang diambil presiden yakni menaikkan harga bahan bakar minyak pada akhir tahun 2005 bersamaan dengan naik tajamnya harga minyak mentah dunia.

Pasca melambungnya harga bahan bakar minyak pada tahun

2005, di tahun 2006 pemerintah mulai melakukan kebijakan-kebijakan untuk menekan angka inflasi yaitu dengan mengendalikan harga-harga pasar. Inflasi berhasil diturunkan sebesar 9,27%, menjadi 6,76% di tahun 2006. Angka tersebut masih dapat ditekan lagi di tahun 2007 hingga mencapai 6,48%.

Inflasi kembali melambung pada tahun 2008 menjadi sebesar 9,66%. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jatim saat itu, Ir. Adi Nugraha mengatakan bahwa khusus di Jawa Timur, inflasi terjadi akibat adanya kenaikan harga indeks pada kelompok makanan barang dan jasa.

Pada tahun 2009 tingkat inflasi di Jawa Timur mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 3,62%, namun pada tahun berikutnya Jawa Timur kembali dihadapkan dengan kenaikan inflasi sehingga di tahun 2010 inflasi Jawa Timur mencapai 6,96%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang 2010 adalah beras, cabe rawit, emas perhiasan, jasa perpanjangan STNK, tarif listrik, bawang merah, rokok kretek filter,

bawang putih, minyak goreng dan biaya di SLTA.

Tahun 2011, Jawa Timur mencapai inflasi sebesar 4,09%, angka ini berada di atas rerata inflasi secara nasional yang hanya 3,79%. Beberapa komoditas yang menjadi pemicu utama dalam pergerakan inflasi selama tahun 2011 adalah kenaikan harga beras, rokok kretek dan emas perhiasan.

Di tahun 2012, inflasi di Jawa Timur mencapai angka 4,50%. Pada tahun 2012 tercatat beberapa kebijakan pemerintah yang memicu tingginya inflasi. Pemerintah mengurangi kuota impor sapi dan daging sapi, sehingga menimbulkan spekulasi dan boikot para importir sapi, yang menyebabkan stagnasi ketersediaan daging di pasar berkurang bahkan sempat kosong daging sapi di pasar dan pengusaha menaikkan harga daging sapi di pasar. Inflasi juga didorong dengan adanya pengaruh krisis perekonomian Negara Eropa dan Amerika yang masih belum recoveri, ditandai dengan gejolak harga emas dunia yang tinggi selama tahun 2012. Sehingga para investor cenderung lebih menyukai

menanamkan investasi kepada emas daripada surat berharga.

Pada tahun 2013, statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat laju inflasi tahun kalender di Jawa Timur tahun 2013 sebesar 7,59%. Selama periode 2013, tiga terbesar komoditas yang memberi sumbangan terhadap terjadinya inflasi di Jawa Timur adalah bensin, tarif listrik, dan bawang merah.

Terkait dengan tingginya inflasi di Jawa Timur ini tentu membawa dampak bagi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur, karena inflasi tersebut mempengaruhi biaya produksi bagi para produsen serta mempengaruhi besarnya investasi yang membawa dampak bagi ketenagakerjaan di Jawa Timur. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan jumlah pekerja tersebut, maka jumlah pengangguran mengalami penurunan karena sebagian besar tenaga kerja terserap ke dalam sektor informal.

Setiap tahunnya dari tahun 2003 hingga 2013 lebih dari 50% penduduk bekerja pada sektor

informal. Tahun 2003 prosentase tingkat pekerja di sektor informal sebesar 68,33%. Prosentase tingkat tenaga kerja sektor informal tersebut terus menurun dari sebesar 68,19% di tahun 2004 hingga pada tahun 2006 prosentase tingkat tenaga kerja pada sektor informal tersebut mencapai angka 65,60%.

Setelah penurunan tingkat tenaga kerja pada sektor informal selama 3 tahun berturut-turut, di tahun 2007 jumlah tenaga kerja pada sektor informal mengalami peningkatan hingga prosentasenya mencapai angka 73,02%. Pada tahun 2008 prosentase tenaga kerja pada sektor informal mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 72,90% di tahun 2008.

Tingkat pekerja pada sektor informal meningkat sebesar 0,22% di tahun 2009 sehingga mencapai 73,12%. Angka ini terus menurun hingga tahun 2012. Pada tahun 2010 prosentase tingkat pekerja sektor informal sebesar 70,93%, turun sebesar 3,16% hingga mencapai 67,77% di tahun 2011. Dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja pada sektor informal ini menggambarkan semakin membaiknya struktur ekonomi

dengan keberhasilan program penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan ekspansi usaha swasta. Tahun 2012 prosentase pekerja sektor informal sebesar 66,20% turun sebesar 1,57% dari tahun sebelumnya, namun sedikit mengalami peningkatan di tahun 2013 hingga sebesar 66,22%.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan model analisis *vector autoregressive*, dapat diketahui bahwa inflasi di Provinsi Jawa Timur berpengaruh signifikan terhadap tingkat pekerja pada sektor informal di Provinsi Jawa Timur. Pengaruh inflasi terhadap tingkat pekerja di sektor informal dapat diketahui melalui uji kausalitas granger dan estimasi model VAR. Nilai F probabilitas statistik inflasi terhadap tingkat pekerja sektor informal pada uji kausalitas *Granger* adalah sebesar 0,0656 sedangkan nilai F probabilitas statistik tingkat pekerja sektor informal terhadap inflasi pada uji kausalitas Granger adalah sebesar 0,2954. Kedua nilai tersebut adalah lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$, maka dari itu H_0 dari kedua hasil uji kausalitas tersebut

diterima. Artinya berdasarkan uji kausalitas *Granger* dapat disimpulkan bahwa hubungan inflasi dan tingkat pekerja pada sektor informal adalah tidak saling mempengaruhi. Hasil uji kausalitas ini tidak sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Berentsen dan kawan-kawan (2008) yang mengatakan bahwa faktor moneter salah satunya inflasi adalah penting untuk hasil tenaga kerja bahkan tidak hanya teoritis, tetapi juga secara kuantitatif.

Pendapat tersebut terbukti pada hasil estimasi VAR yang menyatakan bahwa $D_INFLASI(-1)$ mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pekerja sektor informal, karena pada nilai t statistik $D_INFLASI(-1)$ yaitu 2,00244 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 1,771, sehingga dapat dinyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat pekerja sektor informal. Sedangkan $D_INFORMAL(-1)$ tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel inflasi karena pada nilai t statistik $D_INFORMAL(-1)$ adalah sebesar 1,505959 lebih kecil daripada nilai t tabel. Dari hasil representasi

estimasi VAR diketahui bahwa ketika variabel $D_INFLASI(-1)$ bertambah 1% sedangkan variabel $D_INFORMAL(-1)$ tetap, maka $D_INFORMAL$ akan mengalami penurunan sebesar 0.0906320988552 persen.

Berdasarkan hasil representasi estimasi VAR tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel inflasi dengan tingkat pekerja di sektor informal adalah tidak searah. Seperti yang terjadi pada tahun 2005, ketika tingkat inflasi Jawa Timur meningkat drastis hingga mencapai angka 15,19%, tingkat pekerja sektor informal justru mengalami penurunan dari sebesar 68,19% pada tahun 2004 menjadi sebesar 65,74% di tahun 2005. Hubungan tidak searah antara inflasi dan tingkat pekerja informal juga dapat kita lihat pada tahun 2009 ketika angka inflasi Jawa Timur adalah yang paling rendah selama sepuluh tahun terakhir yakni sebesar 3,62%, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat pekerja informal pada tahun 2009 yang mencapai angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 73,12%

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan *Cost Push Theory* yang dijelaskan oleh Waluyo (2007) bahwa untuk mengetahui proses inflasi perkiraannya diamati dari faktor kelembagaan yang dapat mempengaruhi upah dan harga sehingga akan menaikkan biaya produksi, inflasi ini disebut *cost push inflation*. Naiknya biaya (*cost*) dalam penggunaan input produksi menyebabkan naiknya harga jual produksi, sehingga menyebabkan kenaikan pada harga jual produksi, hal ini dikarenakan kebanyakan pengusaha tidak mau menanggung biaya input.

Kecenderungan kenaikan harga tersebut yang menuntut buruh menuntut kenaikan upah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat bertahan di tengah kondisi inflasi. Menurut teori *iron wage* atau teori upah besi, kenaikan upah akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga para penganggur akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan para pengusaha disulitkan dengan kenaikan biaya produksi. Dengan adanya kebijakan upah minimum menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of*

labour) pada sektor formal. Berdasarkan model dual sektor, kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal.

Ayu dan Kaluge (2009) menyampaikan pendapatnya bahwa pengangguran perempuan dari tahun ke tahun adalah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga tenaga kerja perempuan berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itulah yang memicu timbulnya dominasi peningkatan penduduk perempuan yang bekerja, sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Timur. Namun dominasi peningkatan penduduk perempuan yang bekerja umumnya hanya sebagai pekerja keluarga. Oleh karena itu peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu memberikan implikasi yang positif terhadap peningkatan pendapatan pekerja, karena penambahan jumlah tenaga kerja hanya terserap sebagai pekerja keluarga atau membantu kepala rumah tangga/suami dalam

melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya informal. Dari penjelasan tersebut secara tidak langsung inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat tenaga kerja pada sektor informal.

Namun ternyata pada saat terjadi inflasi, kenaikan tingkat upah tidak secepat kenaikan harga barang. Maka dari itu Lestiyasari (2013) mengatakan dalam penelitiannya bahwa di tengah menghadapi inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur adalah yang paling rendah di Indonesia, sehingga pengeluaran biaya produksi tidak setinggi perusahaan di provinsi lain. Perusahaan akan lebih memilih bertahan, bahkan perusahaan dari daerah lain dimungkinkan berpindah ke Jawa Timur karena Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Hal tersebut yang menyebabkan menurunnya jumlah pekerja sektor informal 5 tahun terakhir ini dikarenakan adanya peningkatan tenaga kerja yang terserap pada sektor formal. Pergeseran tenaga kerja juga dimungkinkan dari pasar informal menuju pasar formal. Hal ini terjadi

bilamana di pasar formal tercipta kesempatan kerja kembali sehingga mengundang pekerja di pasar informal untuk mendapatkan upah yang lebih baik.

Meskipun mengalami inflasi serta tingkat tenaga kerja informal di Jawa Timur terbilang cukup tinggi, namun beberapa tahun terakhir ini jumlah tenaga kerja pada sektor informal tersebut seringkali mengalami penurunan karena adanya kebijakan upah minimum yang dapat mengkaver pekerja pada sektor formal di Provinsi Jawa Timur, terlebih lagi tenaga kerja pada sektor formal di Jawa Timur memperoleh upah di atas Upah Minimum Provinsi, sehingga sektor formal lebih memiliki daya tarik daripada sektor informal.

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai diharapkan dapat berimbas secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk. Suryana (2000) memaparkan bahwa salah satu model pembangunan berorientasi pada penciptaan tenaga kerja. Salah satu yang akan dicapai dari pembangunan ekonomi model ini adalah mengurangi pengangguran

yang ditekankan pada sektor informal di perkotaan dan sektor tradisional di pedesaan. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Lestyasari (2013) yang mengatakan bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari tingginya pekerja di sektor formal dibandingkan pekerja di sektor informal. Hal ini karena sektor informal belum dapat menjamin kesejahteraan penduduk. Selain itu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berpendapat bahwa para pekerja di sektor-sektor informal relatif rentan dikarenakan di sektor informal menyediakan lebih sedikit perlindungan terhadap resiko-resiko dan guncangan, para pekerja informal juga tidak memiliki akses kepada program perlindungan sosial. Para pekerja ini sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan analisis IRF (*Impulse & Responses Function*), inflasi sudah memberikan guncangan terhadap tingkat pekerja sektor informal dengan peningkatan sebesar 0,95863 standart deviasi pada periode pertama. Namun sejak periode ke empat, respon tingkat

pekerja sektor informal yang diakibatkan oleh inflasi mulai mendekati garis keseimbangan atau garis *equilibriumnya*. Respon yang ditunjukkan oleh tingkat pekerja sektor informal selama sepuluh periode selalu negatif.

Karena inflasi memberikan guncangan terhadap tingkat pekerja sektor informal, hal itu menyebabkan D_INFORMAL hanya dapat memiliki kontribusi atas variabelnya sendiri sekitar 95% - 97% sedangkan sisanya adalah kontribusi dari variabel D_INFLASI. Kontribusi variabel D_INFLASI ini termasuk rendah karena masih di bawah 10%.

Peramalan untuk tingkat inflasi selama beberapa tahun ke depan hingga tahun 2023. Hasil forecast menunjukkan bahwa angka inflasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan melainkan terus mengalami penurunan, namun selisih tingkat inflasi dari tahun ke tahun yang akan datang tidak terlalu besar. Peramalan inflasi dari tahun 2014 hingga tahun 2023 berkisar pada angka 7,3% dengan rentang basis angka antara 7,3431% -7,3424%. Sedangkan Peramalan

tingkat pekerja pada sektor informal pada tahun 2014 hingga tahun 2023 berkisar pada angka 68,5%, dengan rentang basis angka antara 68,5344% - 68,5366%.

Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari tahun 2003 hingga 2013 lebih dari 50% penduduk bekerja pada sektor informal, bahkan jumlah tenaga kerja pada sektor informal pada tahun 2007 sangat tinggi, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Namun jumlah tersebut cenderung terus berkurang dari tahun 2009.
2. Inflasi Jawa Timur selama sepuluh tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tingginya tingkat inflasi di beberapa tahun dikarenakan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak serta adanya kenaikan harga indeks pada beberapa komoditas.
3. Inflasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pekerja sektor informal. Ketika variabel inflasi pada

tahun sebelumnya bertambah 1% sedangkan variabel tingkat pekerja sektor informal pada tahun sebelumnya diasumsikan tetap, maka tingkat pekerja pada sektor informal pada tahun yang diteliti akan mengalami penurunan sebesar 0.0906 persen.

4. Peramalan inflasi dari tahun 2014 hingga tahun 2023 berkisar pada angka 7,3% dengan perbedaan basis angka antara 7,3431% - 7,3424%, sedangkan peramalan tingkat pekerja pada sektor informal pada tahun 2014 hingga tahun 2023 berkisar pada angka 68,5% dengan perbedaan basis angka 68,5344% - 68,5366%.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis sebagai upaya dalam membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan lapangan kerja formal terutama untuk adanya status dan jaminan sosial yang lebih mampu menopang peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

2. Meminimalkan bertambahnya pekerja pada sektor informal. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor produksi sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembatasan atau penghapusan sistem alih daya (outsourcing) agar tidak mudah terjadi PHK yang kemudian mendorong orang bekerja di sektor informal.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih mengendalikan tingkat upah minimum di Provinsi Jawa Timur. Dengan upah minimum yang tidak terlalu tinggi, maka akan mengurangi biaya produksi. Sehingga perusahaan akan memilih menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Ajija, Shochrul R. dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afrida BR. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayu, Ida dan Kaluge, David. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Perempuan, (Online), (jiae.ub.ac.id, diakses 28 September 2013)
- Berentsen, Aleksander. dkk. 18 Maret 2008. Inflation and Unemployment in the Long Run, *PIER Working Paper*, (Online), (pier@econ.upenn.edu, diakses 21 November 2013).
- Badan Pusat Statistik. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Jawa Timur 1998-2006. BPS Provinsi Jawa Timur.
- _____. Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur 1998-2006. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Berita Resmi Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur Agustus 2009-2011. BPS Provinsi Jawa Timur.
- _____. 2012. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Timur Bulan Desember 2011. BPS Provinsi Jawa Timur.
- _____. 2013. Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur Agustus 2013. BPS Provinsi Jawa Timur.
- _____. 2013. Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Jawa Timur Bulan Desember 2012. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Boediono. 1990. *Ekonomi Moneter*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2009. *Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta:

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Lestiyasari, Devi. Tanpa Tahun. Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal di Jawa Timur, (Online), (ejournal.unesa.ac.id/article/5910/53/article.pdf, diakses 23 Desember 2013).
- Mankiw, N. Gregory. 2009. *Teori Makro Ekonomi. Terjemahan oleh Imam Nurmawan*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku II*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Poverty Breif. 2014. Kemiskinan dan Perekonomian. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Sanusi, Anwar: 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saskara, Ida A. N. dan Kaluge, David. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Perempuan. *Journal of Indonesian Applied Economics*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<http://jiae.ub.ac.id>, diakses 28 September 2013).
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparmoko. M. dan Irawan. 1999. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Surya, M. Iqbal. 2013. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Inflasi di Kota Surabaya. *Skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya: PE FE Unesa.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika Dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba empat.
- Wahyuni, Daru. 2005. Peran Sektor Informal dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Economia*, (Online), Vol. 1, No. 1, (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Daru%20Wahyuni,%20S.E.,M.Si./Daru%20Wahyuni,%20PERAN%20SEKTORINFORMAL%20DALAM%20MENANGGULANGI%20MASALAH%20PENGANGGURAN%20DI%20INDONESIA.pdf>, diakses 24 Desember 2013).
- Waluyo, Dwi Eko. 2007. *Ekonomika Makro*. Malang: UMM PRESS.
- Zakaria, Junaidin. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press) Jakarta.